

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebijakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Semarang dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan solusi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, perundang-undangan dan wawancara. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan di Polres Semarang. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Semarang bahwa proses dari kebijakan hukum tindak pidana penganiayaan di Polres Semarang, diawali dengan penyelidikan oleh penyidik, pemanggilan saksi atau korban, penangkapan, penahanan, pengumpulan barang bukti jika pada saat melakukan tindak pidana menggunakan barang yang tajam atau tumpul, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, apabila sudah lengkap atau P.21 penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada personil, masyarakat masih kurang tanggap dalam melaporkan pelaku ke pihak kepolisian karena masih khawatir atau kurang tanggap berinteraksi dengan pelaku jika telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam hal mengatasi kendala-kendala Polres Semarang telah mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta melakukan pengusulan biaya sarana dan prasarana.

**Kata Kunci :** Kebijakan, Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak

## **ABSTRACT**

This study aims to find out about the legal policy of criminal acts of persecution carried out by children in Semarang Police Station and to find out the obstacles faced and solutions to efforts to enforce the law against criminal acts of persecution. This study uses a sociological juridical approach, the data source uses primary data and secondary data, namely data obtained from literature, legislation and interviews. Data analysis used descriptive analytical method, which explained, described and described according to the problems in Semarang Police Station. Based on the results of research at the Semarang District Police that the process of the criminal act of maltreatment in Semarang Police, begins with an investigation by the investigator, the summoning of witnesses or victims, arrest, detention, collection of evidence if at the time of committing a sharp or blunt object, settlement and submission of case files, if it is complete or P.21 the investigator surrenders the responsibility of the suspect and the evidence to the personnel, the community is still less responsive in reporting the perpetrators to the police because they are still worried or less responsive to interact with the perpetrators if they already know what has been done by the perpetrator. In terms of overcoming the constraints of the Semarang Police, efforts have been made to inform the public about the Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, as well as proposing the cost of facilities and infrastructure.

**Keywords:** Policies, Criminal Law, Crimes, Persecution, Children